



## Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP-K) di Universitas Negeri Gorontalo

Zelin A. Usman <sup>1\*</sup>, Arifin Tahir <sup>2</sup>, Sri Yulianty Mozin <sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Program Studi S1 Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [zelin@gmail.com](mailto:zelin@gmail.com)

**Abstract.** *This study is motivated by the importance of the effectiveness of the Indonesia Smart Card for Higher Education Program (KIP-K) in expanding access to higher education for students from low-income families at Universitas Negeri Gorontalo. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the KIP-K Program based on the aspects of goal attainment, integration, and adaptation. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation. The data were analyzed through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. In terms of goal attainment, the program helps students continue their education, although several challenges remain, including limited quotas, inaccurate targeting, and suboptimal on-time graduation. In terms of integration, coordination among program administrators, faculties, departments, students, and banking partners has functioned quite well, although academic services for recipients have not been entirely equal. In terms of adaptation, the program has shown the ability to adjust to policy changes and students' needs through periodic evaluation and adjustments to the disbursement mechanism. The implication is that stronger targeting accuracy, academic assistance, service quality, and evaluation systems are needed to ensure more optimal and sustainable program implementation.*

**Keywords:** *Higher Education, Indonesia Smart Card For Higher Education (KIP-K), Policy Integration, Program Adaptation, Program Effectiveness.*

**Abstrak.** Penelitian ini dimotivasi oleh pentingnya efektivitas Program Kartu Pintar Indonesia untuk Pendidikan Tinggi (KIP-K) dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah di Universitas Negeri Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Program KIP-K berdasarkan aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Dari segi pencapaian tujuan, program ini membantu mahasiswa melanjutkan pendidikan mereka, meskipun masih terdapat beberapa tantangan, termasuk kuota yang terbatas, penargetan yang tidak akurat, dan kelulusan tepat waktu yang suboptimal. Dari segi integrasi, koordinasi antara pengelola program, fakultas, departemen, mahasiswa, dan mitra perbankan telah berfungsi cukup baik, meskipun layanan akademik bagi penerima belum sepenuhnya merata. Dari segi adaptasi, program ini telah menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan dan kebutuhan mahasiswa melalui evaluasi berkala dan penyesuaian mekanisme pencairan. Implikasinya adalah dibutuhkan akurasi penargetan yang lebih kuat, bantuan akademis, kualitas layanan, dan sistem evaluasi untuk memastikan implementasi program yang lebih optimal dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Adaptasi Program, Efektivitas Program, Integrasi Kebijakan, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Pendidikan Tinggi.

### 1. LATAR BELAKANG

Pendidikan tinggi memiliki posisi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, penguatan mobilitas sosial, dan peningkatan daya saing bangsa. Namun, akses terhadap pendidikan tinggi di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan ketimpangan sosial-ekonomi yang menyebabkan sebagian calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu mengalami hambatan untuk melanjutkan studi. Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan

pendidikan tidak hanya ditujukan untuk memperluas layanan, tetapi juga untuk menjamin keadilan distribusi kesempatan belajar bagi seluruh warga negara (Keban, 2014). Oleh karena itu, intervensi negara melalui program bantuan pendidikan menjadi penting untuk memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak berujung pada terhambatnya akses pendidikan tinggi.

Salah satu bentuk intervensi tersebut adalah Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), yang dirancang untuk membantu mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin melalui pembebasan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial di bidang pendidikan, tetapi juga sebagai kebijakan afirmatif untuk memperluas akses, menjaga keberlangsungan studi, dan mendorong mahasiswa menyelesaikan pendidikan tinggi secara layak (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020). Dalam perspektif kebijakan publik, program seperti KIP-K harus dipahami sebagai bentuk tindakan negara yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang terintegrasi (Igirisa, 2022).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas program bantuan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian terdahulu menemukan bahwa program KIP belum selalu berjalan optimal karena masih terdapat persoalan ketidaktepatan sasaran, keterlambatan penyaluran bantuan, lemahnya pengawasan, dan belum meratanya dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan program (Limbong, 2023; Setyawati, 2018). Pada jenjang perguruan tinggi, program KIP-K juga terbukti membantu memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu, tetapi implementasinya masih diwarnai kendala administratif, keterbatasan informasi, belum optimalnya koordinasi antarunit, serta belum meratanya dukungan akademik terhadap penerima manfaat (Purnamasari, 2023; Sariri & Prabawati, 2024; Saputra et al., 2025). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas program bantuan pendidikan tidak cukup dilihat dari aspek distribusi dana, melainkan harus ditelaah secara lebih komprehensif sebagai hasil interaksi antara tujuan kebijakan, tata kelola pelaksanaan, dan respons terhadap kebutuhan mahasiswa.

Dalam kerangka efektivitas organisasi, Steers (2013) menegaskan bahwa efektivitas dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dimensi pencapaian tujuan menekankan sejauh mana program mampu menghasilkan output dan outcome sesuai sasaran yang ditetapkan. Dimensi integrasi menilai kemampuan program dalam membangun koordinasi dan keterpaduan antaraktor yang terlibat dalam pelaksanaannya. Sementara itu, dimensi adaptasi menekankan kemampuan program untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, kebutuhan penerima manfaat, dan tantangan teknis yang

muncul selama implementasi. Pendekatan ini relevan digunakan untuk menilai KIP-K karena program tersebut tidak hanya bergantung pada ketepatan alokasi bantuan, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan fleksibilitas kelembagaan dalam merespons kondisi nyata mahasiswa.

Universitas Negeri Gorontalo menjadi konteks yang penting untuk mengkaji efektivitas Program KIP-K. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di kawasan timur Indonesia, universitas ini menjalankan peran strategis dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, termasuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Di sisi lain, tingginya kebutuhan terhadap bantuan pendidikan terlihat dari masih adanya selisih antara jumlah pelamar dan jumlah penerima KIP-K dalam beberapa tahun terakhir (Universitas Negeri Gorontalo, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa program KIP-K memiliki arti penting bagi keberlangsungan studi mahasiswa, tetapi sekaligus menghadapi tantangan dalam hal pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, dan efektivitas pelaksanaan.

Dalam konteks kelembagaan publik kontemporer, efektivitas kebijakan juga sangat ditentukan oleh kemampuan institusi dalam membangun tata kelola yang adaptif, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan penerima layanan. Kelembagaan yang mampu mengombinasikan koordinasi administratif dengan orientasi pelayanan publik yang kuat akan lebih efektif dalam menghasilkan dampak kebijakan yang berkelanjutan (Mozin et al., 2025). Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas Program KIP-K di Universitas Negeri Gorontalo penting dilakukan untuk melihat sejauh mana program ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan pendidikan yang responsif dan berkeadilan.

Meskipun kajian mengenai KIP dan KIP-K telah dilakukan di berbagai daerah, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Sebagian besar studi terdahulu lebih banyak berfokus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sedangkan kajian pada konteks perguruan tinggi, khususnya di wilayah timur Indonesia, masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung menyoroti aspek distribusi bantuan, kendala administratif, atau pemanfaatan dana, tetapi belum banyak yang menganalisis efektivitas program secara menyeluruh melalui dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Kesenjangan ini menunjukkan adanya urgensi akademik sekaligus praktis untuk menghadirkan penelitian yang lebih komprehensif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menganalisis efektivitas Program KIP-K di Universitas Negeri Gorontalo dengan menggunakan perspektif efektivitas organisasi dari Steers (2013) secara terpadu. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya menilai apakah bantuan pendidikan telah tersalurkan, tetapi juga mengkaji apakah program

telah mencapai tujuan kebijakan, bagaimana integrasinya dengan sistem akademik dan administrasi universitas, serta sejauh mana program mampu beradaptasi terhadap kebutuhan mahasiswa dan perubahan teknis pelaksanaan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang lebih utuh dibandingkan studi-studi terdahulu yang cenderung parsial dan berfokus pada satu aspek tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Gorontalo melalui aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Administrasi publik menjadi landasan penting dalam memahami pelaksanaan kebijakan pendidikan, termasuk program bantuan pendidikan tinggi. Administrasi publik tidak hanya mempelajari proses pengelolaan kepentingan publik melalui pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menempatkan negara sebagai aktor yang bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif ini, kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang diarahkan untuk memecahkan persoalan publik secara sistematis dan terukur (Keban, 2014; Igirisa, 2022). Dengan demikian, Program KIP-K dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan publik yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh efektivitas tata kelola administrasi dan kualitas implementasinya di tingkat perguruan tinggi.

Efektivitas merupakan konsep sentral dalam penelitian ini. Secara umum, efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan suatu organisasi, program, atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dalam administrasi publik, efektivitas menjadi indikator penting untuk menilai apakah suatu kebijakan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi kelompok sasaran. Konsep ini juga berkaitan erat dengan hubungan antara rencana, pelaksanaan, dan hasil. Dengan demikian, efektivitas program bantuan pendidikan tidak cukup diukur dari penyaluran dana atau jumlah penerima manfaat, tetapi harus dilihat dari sejauh mana program mampu memperluas akses pendidikan, mendukung keberlangsungan studi, dan memberikan dampak akademik maupun sosial bagi penerima manfaat (Madjid et al., 2021; Steers, 2013).

Dalam konteks organisasi publik, efektivitas tidak hanya diukur dari tercapainya target formal, tetapi juga dari kemampuan lembaga memberikan pelayanan yang responsif, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan. Isa (2009) menegaskan bahwa efektivitas organisasi publik berkaitan erat dengan kualitas pelayanan,

akuntabilitas, dan kemampuan institusi menjalankan fungsi-fungsi organisasi secara optimal. Pandangan ini relevan dengan penelitian ini karena Program KIP-K tidak hanya menuntut keberhasilan administratif dalam penyaluran bantuan, tetapi juga kualitas pelayanan akademik dan administratif yang dirasakan langsung oleh mahasiswa penerima.

Kerangka analisis utama dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi dari Richard M. Steers. Menurut Steers (2013), efektivitas organisasi dapat dinilai melalui tiga indikator utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pencapaian tujuan mengacu pada kemampuan organisasi atau program dalam merealisasikan sasaran yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, pencapaian tujuan berkaitan dengan sejauh mana Program KIP-K mampu meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu, membantu keberlangsungan studi, serta mendukung penyelesaian pendidikan secara tepat waktu. Dimensi ini penting karena tujuan dasar Program KIP-K adalah memastikan bahwa mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin tetap memiliki kesempatan menempuh pendidikan tinggi.

Indikator kedua adalah integrasi, yaitu kemampuan organisasi dalam membangun hubungan yang harmonis, koordinatif, dan partisipatif antara unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan program. Dalam konteks KIP-K, integrasi mencakup hubungan antara pengelola program, fakultas, jurusan, mahasiswa penerima, serta pihak eksternal seperti perbankan. Integrasi yang baik menunjukkan adanya komunikasi yang lancar, keterpaduan prosedur, dan dukungan kelembagaan yang memadai. Tanpa integrasi yang kuat, pelaksanaan program berpotensi mengalami hambatan administratif, keterlambatan informasi, dan ketidakseimbangan layanan bagi penerima manfaat (Steers, 2013).

Indikator ketiga adalah adaptasi, yaitu kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, kebutuhan sasaran, dan tantangan pelaksanaan. Adaptasi menjadi penting karena program bantuan pendidikan tidak berjalan dalam situasi yang statis. Perubahan kebijakan, dinamika kebutuhan mahasiswa, serta tantangan teknis penyaluran bantuan menuntut pengelola program untuk bersikap responsif dan fleksibel. Dalam penelitian ini, adaptasi merujuk pada kemampuan Program KIP-K untuk menyesuaikan mekanisme pelaksanaan, pola evaluasi, dan sistem penyaluran bantuan agar tetap relevan dengan kebutuhan mahasiswa (Steers, 2013).

Dalam substansi kebijakan, Kartu Indonesia Pintar Kuliah merupakan program bantuan pendidikan tinggi yang dirancang pemerintah untuk memperluas akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi. Program ini merupakan kelanjutan dari skema sebelumnya, yaitu Bidikmisi, dan mulai dikembangkan lebih luas sejak tahun 2020. Secara normatif, keberadaan KIP-K merupakan wujud tanggung jawab

negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya dalam memperluas kesempatan belajar di perguruan tinggi. Program ini tidak hanya mencakup pembebasan biaya pendidikan, tetapi juga bantuan biaya hidup untuk mendukung mahasiswa selama menjalani studi (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020).

Tujuan utama Program KIP-K adalah meningkatkan perluasan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, meningkatkan prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa, menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dari daerah khusus atau wilayah terdampak, serta meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Dengan demikian, KIP-K bukan sekadar bantuan finansial, tetapi juga kebijakan afirmatif yang diarahkan untuk mendukung pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik juga sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Igrisa, dkk (2022) menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan, meskipun kebijakan tersebut telah dirancang dengan tujuan yang baik. Dalam konteks Program KIP-K, argumen ini menegaskan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bantuan, tetapi juga oleh kemampuan pengelola dalam memastikan ketepatan sasaran, konsistensi pelaksanaan, dan evaluasi yang berkelanjutan.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas program KIP masih menghadapi berbagai kendala. Limbong (2023) menemukan bahwa penggunaan dana bantuan KIP belum berjalan efektif karena masih terjadi ketidaktepatan sasaran, distribusi dana yang belum merata, dan lemahnya pengawasan penggunaan bantuan. Nasution (2017) menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KIP di tingkat SMA juga belum optimal akibat masih adanya siswa yang tidak memperoleh bantuan, keterlambatan penyaluran dana, dan rendahnya partisipasi pihak bank dalam mendukung distribusi bantuan. Pada tingkat perguruan tinggi, Purnamasari (2023) menunjukkan bahwa program ini cukup membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan studi, tetapi masih menghadapi persoalan dalam proses seleksi penerima, akses terhadap dana bantuan, dan kendala administratif. Sementara itu, Setyawati (2018) menunjukkan bahwa Program KIP cukup efektif dalam membantu kebutuhan pendidikan siswa, tetapi masih ditemukan masalah dalam mekanisme pencairan, penyelewengan penggunaan dana, dan pertanggungjawaban bantuan.

Berdasarkan telaah tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya menempatkan efektivitas program lebih banyak pada aspek distribusi bantuan dan kendala administratif. Padahal, efektivitas program bantuan pendidikan seharusnya dianalisis secara lebih menyeluruh dengan melihat hubungan antara tujuan program, keterpaduan kelembagaan, dan kemampuan program beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan penerima manfaat. Selain itu, kelembagaan pemerintahan di era modern dituntut untuk bergerak ke arah tata kelola yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis pelayanan. Mozin et al. (2025) menekankan bahwa reformasi kelembagaan dalam era smart governance menuntut organisasi publik untuk tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga pada kebutuhan pengguna layanan. Dalam penelitian ini, perspektif tersebut memperkuat analisis bahwa efektivitas Program KIP-K tidak cukup dinilai dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari sejauh mana program mampu memberi pelayanan yang tepat sasaran, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami secara mendalam fenomena efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Gorontalo dalam konteks alamiah pelaksanaannya. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian berupaya menangkap makna, pengalaman, dan dinamika yang muncul dalam implementasi program, khususnya yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi program di lingkungan perguruan tinggi (Abdussamad, 2021; Mantula et al., 2024).

Penelitian dilaksanakan di Universitas Negeri Gorontalo sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang secara konsisten menerima dan mengelola Program KIP-K. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu efektivitas pelaksanaan KIP-K dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Waktu penelitian berlangsung selama enam bulan, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, observasi lapangan, wawancara, analisis data, hingga penyusunan hasil penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterlibatan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan Program KIP-K, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan pengelolaan program, data penerima bantuan, serta berbagai arsip pendukung yang relevan. Informan penelitian berjumlah 15 orang, yang terdiri atas Ketua Pengelola Program KIP-K, pengelola program pada Biro Akademik, Kemahasiswaan dan

Perencanaan, Ketua Umum FORSIMAKIP, mahasiswa penerima manfaat Program KIP-K, serta orang tua mahasiswa penerima manfaat. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung, pengalaman, dan kapasitas informan dalam memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan penilaian informan terhadap pelaksanaan Program KIP-K. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan program, situasi layanan, serta interaksi antaraktor yang terlibat dalam pengelolaan KIP-K di lingkungan universitas. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data hasil wawancara dan observasi melalui penelaahan dokumen resmi seperti pedoman program, laporan evaluasi, data kuota dan penerima, serta arsip administrasi lainnya.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Kehadiran peneliti di lapangan memungkinkan proses pengumpulan data dilakukan secara langsung, intensif, dan kontekstual. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menafsirkan makna dari informasi yang diperoleh melalui interaksi dengan informan dan situasi penelitian. Untuk menjaga kualitas data, peneliti melakukan pencatatan secara sistematis, refleksi kritis terhadap temuan lapangan, serta pengecekan ulang terhadap informasi yang dianggap penting.

Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Harahap, 2021). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data yang diperoleh dari lapangan agar relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan terus-menerus selama proses penelitian, disertai verifikasi untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan benar-benar didukung oleh data yang memadai.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan klarifikasi ulang kepada informan ketika ditemukan data yang belum konsisten atau membutuhkan penegasan lebih lanjut. Dengan cara ini, data yang digunakan dalam penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Program KIP-K di Universitas Negeri Gorontalo dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi (Steers, 2013).

##### **Pencapaian Tujuan**

Pada dimensi pencapaian tujuan, Program KIP-K telah memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan dalam bentuk pembebasan biaya pendidikan dan biaya hidup dinilai membantu mahasiswa mempertahankan keberlangsungan studi. Dari sisi penerima manfaat, KIP-K tidak hanya mengurangi beban ekonomi keluarga, tetapi juga memberi ruang yang lebih besar bagi mahasiswa untuk fokus pada kegiatan akademik. Temuan ini menunjukkan bahwa secara substantif program telah menjalankan fungsi dasarnya sebagai kebijakan afirmatif untuk mendukung mahasiswa yang menghadapi keterbatasan ekonomi (Saputra et al., 2025).

Meskipun demikian, pencapaian tujuan program belum sepenuhnya optimal. Data penelitian menunjukkan bahwa jumlah pelamar KIP-K di Universitas Negeri Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir cenderung lebih tinggi dibandingkan jumlah penerima, yang menandakan adanya kesenjangan antara kebutuhan riil mahasiswa dan kapasitas program (Universitas Negeri Gorontalo, 2024). Persoalan lain adalah ketepatan sasaran penerima. Keterbatasan verifikasi lapangan berpotensi menyebabkan proses seleksi lebih bertumpu pada verifikasi administratif, sehingga membuka peluang ketidaksesuaian antara kondisi sosial-ekonomi riil dan status penerima bantuan. Temuan ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa efektivitas program bantuan pendidikan sering terkendala oleh ketidaktepatan sasaran dan lemahnya pengawasan (Limbong, 2023).

Temuan ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan Program KIP-K tidak dapat dilepaskan dari kualitas pengawasan dan evaluasi dalam implementasinya. Igirisa et al. (2022) menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan verifikasi lapangan dan munculnya dugaan ketidaktepatan sasaran menunjukkan bahwa pengawasan program masih perlu diperkuat agar tujuan pemerataan akses pendidikan tinggi dapat dicapai secara lebih optimal.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa bantuan finansial tidak secara otomatis menjamin capaian akademik yang optimal. Variasi kedisiplinan, motivasi belajar, dan kemampuan mahasiswa dalam mengelola bantuan memengaruhi hasil akademik yang dicapai. Dengan demikian, Program KIP-K berfungsi sebagai faktor pendukung yang penting, tetapi

keberhasilan akademik tetap bergantung pada kualitas pembinaan dan tanggung jawab individu mahasiswa penerima.

### **Integrasi**

Pada dimensi integrasi, pelaksanaan Program KIP-K telah melibatkan berbagai unsur kelembagaan kampus, terutama Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan, fakultas, ketua jurusan, dan pimpinan fakultas. Koordinasi antarunit ini tampak dalam mekanisme evaluasi dan monitoring rutin setiap akhir semester. Dari perspektif mahasiswa, keterlibatan berbagai pihak kampus dinilai cukup membantu dalam kelancaran pengelolaan program. Selain itu, mahasiswa penerima juga merasa bahwa keberadaan program diterima secara positif di lingkungan kampus dan tidak menimbulkan eksklusi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi program berlangsung tidak hanya pada level administratif, tetapi juga pada level sosial dan partisipatif (Steers, 2013; Sariri & Prabawati, 2024).

Keberadaan organisasi mahasiswa penerima KIP-K juga memperkuat integrasi pelaksanaan program. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah komunikasi, penyampaian aspirasi, dan penghubung antara mahasiswa penerima dengan pengelola program. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan organisasi, evaluasi, dan aktivitas kemahasiswaan menunjukkan bahwa program tidak hanya berjalan sebagai mekanisme distribusi bantuan, tetapi juga sebagai ruang pembinaan dan partisipasi sosial mahasiswa.

Namun, integrasi program belum sepenuhnya tanpa kendala. Beberapa mahasiswa masih mengeluhkan adanya pengalaman layanan akademik yang belum sepenuhnya setara. Dalam konteks efektivitas organisasi, kondisi tersebut penting dicermati karena integrasi yang efektif tidak hanya diukur dari koordinasi formal, tetapi juga dari kualitas pengalaman penerima manfaat dalam mengakses layanan yang terkait dengan program.

Dari sudut pandang efektivitas organisasi publik, integrasi tidak hanya berbicara tentang adanya hubungan formal antarunit, tetapi juga tentang kualitas pelayanan yang diterima oleh kelompok sasaran. Isa (2009) menjelaskan bahwa efektivitas organisasi dalam pelayanan publik ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam memberikan layanan yang responsif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Dalam penelitian ini, meskipun koordinasi antara pengelola, fakultas, dan jurusan telah berjalan cukup baik, masih adanya keluhan terkait layanan akademik menunjukkan bahwa integrasi program perlu diperkuat pada tingkat operasional agar mahasiswa penerima KIP-K benar-benar memperoleh layanan yang setara.

## **Adaptasi**

Pada dimensi adaptasi, Program KIP-K menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan mahasiswa penerima. Salah satu bentuk adaptasi yang menonjol adalah pelaksanaan evaluasi dan monitoring rutin setiap akhir semester. Program juga memperlihatkan penyesuaian teknis dalam mekanisme pencairan bantuan agar lebih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selain penyesuaian teknis, dimensi adaptasi tampak pada upaya kampus mendorong mahasiswa penerima KIP-K untuk aktif dalam kegiatan pengembangan diri. Dalam hal ini, program tidak semata dipahami sebagai bantuan ekonomi, melainkan juga sebagai instrumen pembentukan tanggung jawab akademik dan sosial mahasiswa (Steers, 2013).

Walaupun demikian, adaptasi program masih menghadapi keterbatasan. Masih terdapat keluhan mengenai keterlambatan penyaluran dana, ketidaksesuaian jumlah bantuan dengan kebutuhan riil mahasiswa, dan perlunya evaluasi yang lebih terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi program memang ada, tetapi belum sepenuhnya mampu mengatasi seluruh tekanan eksternal maupun internal yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan KIP-K. Karena itu, adaptasi yang sudah berjalan perlu diperkuat melalui sistem evaluasi yang lebih konsisten, pengawasan yang lebih baik, dan tindak lanjut kebijakan yang lebih responsif (Setyawati, 2018; Saputra et al., 2025).

Kemampuan adaptasi program juga berkaitan erat dengan kapasitas kelembagaan dalam merespons perubahan kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Mozin et al. (2025) menegaskan bahwa kelembagaan publik yang efektif di era smart governance adalah kelembagaan yang mampu membangun tata kelola yang fleksibel, terintegrasi, dan berorientasi pada pengguna layanan. Dalam konteks Program KIP-K di Universitas Negeri Gorontalo, penyesuaian mekanisme pencairan bantuan dan evaluasi rutin menunjukkan adanya upaya ke arah tersebut, meskipun masih dibutuhkan penguatan tindak lanjut kebijakan dan sistem evaluasi agar adaptasi program menghasilkan dampak yang lebih nyata bagi mahasiswa penerima.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program KIP-K di Universitas Negeri Gorontalo berada pada kategori cukup baik. Program telah menunjukkan peran strategis sebagai instrumen pemerataan akses pendidikan tinggi, tetapi keberhasilan jangka panjangnya tetap bergantung pada penguatan sistem seleksi, peningkatan kualitas layanan, dan penyempurnaan mekanisme evaluasi serta pendampingan mahasiswa.

Secara konseptual, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas Program KIP-K di Universitas Negeri Gorontalo perlu dipahami dalam kerangka kebijakan publik yang lebih luas.

Igirisa (2022) menempatkan kebijakan publik sebagai instrumen negara untuk menjawab persoalan masyarakat melalui proses yang sistematis, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, efektivitas KIP-K bukan hanya soal keberhasilan administratif dalam menyalurkan bantuan, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan tersebut mampu menciptakan akses pendidikan tinggi yang lebih adil, layanan yang lebih responsif, dan tata kelola kelembagaan yang lebih adaptif.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Gorontalo dapat dinilai cukup efektif dalam mendukung akses pendidikan tinggi dan keberlangsungan studi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Pada aspek pencapaian tujuan, program ini telah membantu mahasiswa melalui pembebasan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup, tetapi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan kuota, ketidaktepatan sasaran penerima, serta variasi capaian akademik mahasiswa. Pada aspek integrasi, pelaksanaan Program KIP-K telah menunjukkan keterpaduan yang cukup baik antara pengelola program, fakultas, jurusan, mahasiswa, dan mitra pendukung melalui koordinasi, monitoring, dan evaluasi rutin, meskipun masih ditemukan kendala dalam beberapa layanan akademik. Pada aspek adaptasi, Program KIP-K menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan dan kebutuhan mahasiswa, tetapi masih perlu diperkuat agar lebih responsif terhadap kendala di lapangan.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pengelola Program KIP-K memperkuat sistem seleksi dan verifikasi penerima agar bantuan lebih tepat sasaran. Universitas juga perlu meningkatkan kualitas koordinasi lintas unit dan memastikan bahwa mahasiswa penerima memperoleh dukungan akademik dan administratif yang setara. Selain itu, mekanisme evaluasi program perlu diperkuat secara lebih terstruktur dan berkelanjutan agar setiap penyesuaian kebijakan benar-benar mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokasi kajian atau melakukan perbandingan antarperguruan tinggi agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas Program KIP-K di Indonesia.

## **DAFTAR REFERENSI**

Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian kualitatif. *Makassar: CV. Syakir Media Press.*  
<https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>

- Harahap, M. N. (2021). Analisis data penelitian kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman. *Jurnal Manhaj*, 18(1).
- Igirisa, I. (2022). Kebijakan publik: Suatu tinjauan teoritis dan empiris. *Yogyakarta: Tanah Air Beta*.
- Igirisa, I., Tahir, A., & Hatu, R. A. (2022). Implementation of the supervision of the regional house of representatives' function in the management of the regional budget in Buol Regency. *Journal of Gender, Culture and Society*, 2(1), 46-50. <https://doi.org/10.32996/jgcs.2022.2.1.4>
- Isa, R. (2009). Efektivitas organisasi kecamatan dalam pelayanan publik setelah menjadi perangkat daerah. *Jurnal Inovasi*, 6(04).
- Keban, Y. T. (2014). Enam dimensi strategis administrasi publik. *Yogyakarta: Gava Media*.
- Limbong, N. O. (2023). Efektivitas penggunaan dana bantuan Kartu Indonesia Pintar bagi siswa SMA Negeri 1 Sigunung Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara (Tesis/Skripsi). *UIN Ar-Raniry, Banda Aceh*.
- Madjid, U., Nurrahman, A., & Ramadhani, N. A. P. (2021). Efektivitas program Tarjilu Okke di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Registratie*, 3(2). doi:10.33701/jurnalregistratie.v3i2.2363 <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v3i2.2363>
- Mantula, F., Mpofu, A. C., Mpofu, F. Y., & Shava, G. N. (2024). Qualitative research approach in higher education: Application, challenges and opportunities. *East African Journal of Education and Social Sciences*, 5(1). doi:10.46606/eajess2024v05i01.0343 <https://doi.org/10.46606/eajess2024v05i01.0343>
- Mozin, S. Y., Pakaya, R., Anggraini, M., Amanda, N. M., Lestari, D. A., Sampara, M. P., & Lanio, A. H. (2025). Kelembagaan pemerintahan di era smart governance: Strategi reformasi menuju pelayanan publik berbasis teknologi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 7218-7227.
- Nasution, D. F. (2017). Efektivitas pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Tanjungbalai (Skripsi). *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.
- Purnamasari, N. (2023). Efektivitas program beasiswa Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare (Skripsi). *IAIN Parepare, Parepare*.
- Saputra, D., Harjanto, T., & Prasetyo, A. (2025). Efektivitas program KIP-K dalam meningkatkan prestasi dan akses pendidikan mahasiswa kurang mampu. *ISO: Jurnal Ilmiah Sosial dan Politik*, 7(1), 23-34.
- Sariri, R., & Prabawati, Y. (2024). Evaluasi program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 89-100.

Setyawati, S. (2018). Efektivitas program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar) (Skripsi). *IAIN Purwokerto, Purwokerto*.

Steers, R. M. (2013). *Organizational effectiveness: A behavioral view*. New York, NY: McGraw-Hill.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Universitas Negeri Gorontalo. (2024). Laporan penerima beasiswa KIP-K tahun 2021-2024. *Gorontalo: Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Perencanaan Universitas Negeri Gorontalo*.